



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.107/M.PPN/HK/12/2012

TENTANG

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013.**
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013.
- KEDUA** : Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Tahun 2013, adalah dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2013.
- KETIGA** : Rencana Kerja Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** terdiri atas Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 dan Rincian Rencana Kerja Tahun 2013.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Rincian Rencana Kerja Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memuat rencana kegiatan dan anggaran dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Rincian Rencana Kerja Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.107/M.PPN/ HK/12/2012
TANGGAL 28 DESEMBER 2012

RENCANA KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L. Berdasarkan peraturan tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyusun Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 sebagai penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014.

Penyusunan Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 diarahkan untuk pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 memuat 4 (empat) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai: 1) pengambil kebijakan/keputusan; 2) *think tank*; 3) koordinator; dan 4) administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana

alam ...

alam dan perubahan iklim (*climate change*); Peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya; Peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator, Kementerian PPN/Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah, seperti: (i) penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; (ii) koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; (iii) koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait; serta (iv) koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan; Selanjutnya, peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai administrator, Kementerian PPN/Bappenas melakukan, antara lain: (i) pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); (ii) penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta (iii) pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Untuk mewujudkan peran dan kewenangan tersebut, maka diperlukan rencana rinci yang dituangkan dalam Renja tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2013.

B. Kondisi Umum

Perkembangan global dan perubahan di tingkat nasional menuntut peran perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar kualitas pembangunan semakin hari semakin baik dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan anggota masyarakat. Terhadap persoalan-persoalan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyikapi dengan beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat menunjang penguatan peran dalam perencanaan pembangunan nasional, sekaligus merencanakan berbagai kegiatan internal yang mendukung peran dalam bidang perencanaan tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan mengacu pada visi, misi dan strategi organisasi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010-2014.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. Visi Kementerian PPN/Bappenas

Visi Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2010-2014 adalah "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara". Pengertian visi adalah:

- Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

Dengan visi tersebut, diharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah.

B. Misi ...

B. Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

C. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas. Kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan tugas-tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden/Pemerintah kepada Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, seperti koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan

kerusakan ...

kerusakan dan kerugian (*damages and losses assessment*) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (*needs assessment*) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan sebagainya.

D. Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013

Mengacu pada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - a) tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
 - 1) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN;
 - 2) % kesesuaian Renja K/L 2013 dengan target/sasaran dalam rancangan RKP 2013.
 - b) tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP, diukur dari:
 - 1) pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RKP 2013.
 - 2) pendapat *stakeholders* tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.
2. Sasaran dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Presiden/Pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Program Teknis (Utama) dan Program Generik (Pendukung), sebagai berikut:

1. Program teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pada Program ini dilakukan oleh Kedeputian/Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Program ...

2. Program generik

1) Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Bappenas.

Pelaksanaan kegiatan pada Program ini dilakukan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas, dan Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas

2) Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Pelaksanaan kegiatan pada Program ini dilakukan oleh Biro Umum (Setmen PPN/Settama Bappenas)

3) Program generik 3 : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Pelaksanaan kegiatan pada Program ini dilakukan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Utama Bappenas

Target Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 dalam mencapai sasaran tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TARGET PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TAHUN ANGGARAN 2013

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTPUT/OUTCOME | INDIKATOR | TARGET 2013 | PELAKSANA |
|--|--|---|-------------|---|
| Program Perencanaan Pembangunan Nasional | 1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN) dan RKP) yang berkualitas 2. Terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional | 1. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014 | 100% | Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kedeputian |
| | | 2. % kesesuaian rancangan Renja K/L 2013 dengan target/sasaran dalam rancangan RKP 2013 | 100% | |
| | | 3. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan dokumen RKP 2013 | Cukup baik | |
| | | 4. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang dokumen RKP 2013 yang telah ditetapkan | Cukup baik | |
| | | 5. % tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden | 85% | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | OUTPUT/ OUTCOME | INDIKATOR | TARGET 2013 | PELAKSANA |
|--|--|--|----------------|--|
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Bappenas | Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas | 1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia | 100% | Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Staf Ahli Menteri |
| | | 2. Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas | Baik | |
| | | 3. % fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan mitra kerja, baik di pusat maupun daerah | Baik | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas | 1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas | 100% | Setmen PPN/Settama Bappenas (Biro Umum) |
| | | 2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas | 100% | |
| Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas | Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Kementerian PPN/Bappenas | 1. Opini WTP dari BPK | Baik | Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Inspektorat Utama Bappenas |
| | | 2. Standar penilaian <i>good governance</i> | Baik | |
| | | 3. Standar penilaian AKIP | Baik | |

BAB III

KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013

A. Kebijakan Nasional

Untuk pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dengan penentuan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Di samping sebelas Prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

B. Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Sejalan dengan prioritas nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2013, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan ...

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

C. Kegiatan Prioritas

Sebagai instrumen dalam menjalankan kebijakan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Kegiatan Prioritas pada tiap-tiap Program untuk tahun 2013 yaitu:

1. Kegiatan Prioritas pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup antara lain:
 - Penyusunan RKP Tahun 2014 sesuai dengan RPJMN 2010-2014
 - Penyiapan *background study* penyusunan RPJMN 2015-2019
 - Memperkuat dan meningkatkan efektifitas program-program Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014

- Memperkuat ...

- Memperkuat peran Indonesia dalam pelaksanaan agenda-agenda internasional (*Global Partnership*, G-20, dan Pengembangan Selatan Selatan serta MDG's dan Pasca 2015)
 - Persiapan koordinasi, Pelaksanaan *Compact Program* Hibah *Millenium Challenge Corporation* untuk Indonesia
2. Kegiatan Prioritas pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mencakup antara lain:
- Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (melalui Program SPIRIT dan PHRDP)
 - Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Dukungan perkuatan koordinasi perencanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, melalui dana Dekonsentrasi kepada 33 Provinsi
3. Kegiatan Prioritas pada Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur Bappenas mencakup antara lain:
- Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas
 - Pembangunan gedung baru Kementerian PPN/Bappenas
4. Kegiatan Prioritas pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas mencakup antara lain:
- Mempertahankan opini Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian)

Dalam melaksanakan kegiatan prioritas tersebut, di tahun 2013 Kementerian PPN/Bappenas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.055,09 miliar. Alokasi anggaran ini mengalami kenaikan sekitar 36,6% dari alokasi anggaran setelah revisi anggaran bulan Oktober 2012. Peningkatan ini antara lain oleh adanya alokasi *Compact Program* Hibah *Millenium Corporate Challenge* untuk Indonesia, adanya alokasi tambahan biaya untuk pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Program SPIRIT dan PHRDP, dan penyiapan *background study* penyusunan RPJMN 2015-2019. Sumber pembiayaan dari alokasi ini adalah: Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 579,62 miliar, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 256,09 miliar, dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 219,38 miliar.

Sebagian besar, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas adalah Jenis Belanja Barang. Hal ini dikarenakan tujuan dari pencapaian visi, misi Kementerian PPN/Bappenas adalah terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Seperti tahun 2012, pada tahun 2013 alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari 4 (empat) Program dan 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker). Adapun ketigapuluhlima Satker tersebut adalah: 1) Satker Kantor Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 1 Satker, 2) Satker Pengelolaan Hibah MCC sebanyak 1 Satker, dan 3) Satker Dekonsentrasi sebanyak 33 Satker.

Rincian pendistribusian alokasi anggaran berdasarkan program dan alokasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Rp. miliar

| No | Program | RM | PLN | HLN | Total |
|----|---|--------|--------|--------|----------|
| 1 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya | 351,42 | 185,93 | 1,58 | 538,93 |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 57,75 | - | - | 57,75 |
| 3 | Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur | 4,80 | - | - | 4,80 |
| 4 | Perencanaan Pembangunan Nasional | 165,65 | 70,16 | 217,80 | 453,61 |
| | Jumlah | 579,62 | 255,09 | 219,38 | 1.055,09 |

| No | Jenis Belanja | Rp Miliar |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | Belanja Pegawai | 101,19 |
| 2 | Belanja Barang | 903,62 |
| 3 | Belanja Modal | 50,28 |
| | Jumlah | 1.055,09 |

BAB IV
PENUTUP

Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013. Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 telah sesuai dengan Alokasi Anggaran yang dikeluarkan Menteri Keuangan, memuat program, kegiatan dan anggaran yang pada akhirnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013.

Dengan disahkannya DIPA tersebut maka unit kerja eselon I dan unit kerja II Kementerian PPN/Bappenas dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.107/M.PPN/ HK/12/2012
TANGGAL 28 DESEMBER 2012

RINCIAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2013

Rp. Ribu

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|-----------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 055 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 579.612.654 | 256.090.796 | 219.386.000 | 1.055.089.450 |
| 055.01.01 | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | 351.415.157 | 185.930.196 | 1.580.196 | 538.925.549 |
| 2911 | Pelayanan Kehumasan, Keprotokolalan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan | 8.138.492 | - | - | 8.138.492 |

Konsultian ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Konsultansi Media dan Kehumasan | 1.545.070 | - | - | 1.545.070 |
| | Kegiatan Persidangan dan Keprotokolan | 419.193 | - | - | 419.193 |
| | Fasilitasi dan Penanganan Bahan Pimpinan | 428.900 | - | - | 428.900 |
| | Koordinasi Komunikasi Publik, Antarlembaga, dan Media Massa | 980.652 | - | - | 980.652 |
| | Penyempurnaan SOP PPID Bappenas | 310.900 | - | - | 310.900 |
| | Diseminasi Produk-Produk Kementerian PPN/Bappenas | 2.060.000 | - | - | 2.060.000 |
| | Penyempurnaan Konsep SOP Persidangan dan Keprotokolan | 136.153 | - | - | 136.153 |
| | Publikasi Informasi Musrembangnas 2013 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 |
| | PPK II Sesmen PPN/Bappenas | 357.624 | - | - | 357.624 |
| 2912 | Pembinaan dan Pelayanan Hukum | 1.255.000 | - | - | 1.255.000 |
| | Peningkatan Kualitas Bantuan dan Pendamping Hukum | 475.000 | - | - | 475.000 |

Peningkatan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Peningkatan Kesadaran Hukum | 450.000 | - | - | 450.000 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Legislasi | 330.000 | - | - | 330.000 |
| 2913 | Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana | 78.560.931 | - | - | 78.560.931 |
| | Koordinasi Perencanaan dan Anggaran | 400.000 | - | - | 400.000 |
| | Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program | 500.000 | - | - | 500.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan | 450.000 | - | - | 450.000 |
| | Koordinasi Penyusunan info kajian | 500.000 | - | - | 500.000 |
| | Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi | 500.000 | - | - | 500.000 |
| | Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan | 350.000 | - | - | 350.000 |
| | Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Perencanaan | 300.000 | - | - | 300.000 |
| | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya | 41.160.931 | - | - | 41.160.931 |

Dukungan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Dukungan Teknis Lainnya (Dana Dekonsentrasi dan Sekretariat) | 34.400.000 | - | - | 34.400.000 |
| 2914 | Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian | 4.158.145 | - | 1.580.196 | 5.738.341 |
| | Koordinasi Pembinaan Kepangkatan Pegawai | 308.140 | - | - | 308.140 |
| | Koordinasi Pembinaan Baperjakat | 450.005 | - | - | 450.005 |
| | Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional | 505.000 | - | - | 505.000 |
| | Koordinasi Pengembangan SDM | 620.000 | - | - | 620.000 |
| | Pengembangan Sistem Informasi SDM | 525.000 | - | - | 525.000 |
| | Evaluasi Kompetensi Manajerial SDM | 600.000 | - | - | 600.000 |
| | Evaluasi Profil Kompetensi Jabatan Struktural | 380.000 | - | - | 380.000 |
| | Evaluasi Penetapan Jabatan Melalui Kebijakan Pola Akhir | 280.000 | - | - | 280.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Baru | 490.000 | - | - | 490.000 |

Kegiatan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Kegiatan IDF | - | - | 1.580.196 | 1.580.196 |
| 2915 | Pelayanan Umum dan Keuangan | 190.056.164 | - | - | 190.056.164 |
| | Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Termasuk Tunjangan Kinerja) | 101.184.420 | - | - | 101.184.420 |
| | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | 28.861.714 | - | - | 28.861.714 |
| | Pelayanan Publik Atau Birokrasi | 19.685.346 | - | - | 19.685.346 |
| | Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pelayanan Umum | 5.102.545 | - | - | 5.102.545 |
| | Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan | 35.222.139 | - | - | 35.222.139 |
| 2916 | Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 6.575.196 | - | - | 6.575.196 |
| | Pemutakhiran Konten Web Site Bappenas | 225.000 | - | - | 225.000 |
| | Peningkatan Pengelolaan Data Center | 300.000 | - | - | 300.000 |

Pemeliharaan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Pemeliharaan Sistem Informasi | 925.000 | - | - | 925.000 |
| | Pengembangan Aplikasi Jejaring Kerja | 953.375 | - | - | 953.375 |
| | Pelestarian dan Inventarisasi arsip inaktif | 304.518 | - | - | 304.518 |
| | Penyusunan Instrumen Pengelolaan Arsip | 428.127 | - | - | 428.127 |
| | Koordinasi Kearsipan | 374.312 | - | - | 374.312 |
| | Sewa Layanan Akses Sistem Digital Jurnal | 804.000 | - | - | 804.000 |
| | Apresiasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Kearsipan | 272.618 | - | - | 272.618 |
| | Pemeliharaan dan Pengembangan <i>E-Planning</i> dan <i>E-Monev</i> | 516.000 | - | - | 516.000 |
| | Kerjasama Data dan Sistem Informasi | 346.100 | - | - | 346.100 |
| | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 36.200 | - | - | 36.200 |
| | Pengumpulan Dokumen Internal dan Eksternal | 39.946 | - | - | 39.946 |

Penguatan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Penguatan Instrumen Teknologi Informasi <i>Knowledge Management</i> | 600.000 | - | - | 600.000 |
| | Peningkatan Sistem Keamanan Data dan Informasi | 450.000 | - | - | 450.000 |
| 2917 | Pembinaan Perencana dan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan | 59.171.229 | 185.930.196 | - | 245.101.425 |
| | PHRDP III | 55.945.341 | 95.873.717 | - | 151.819.058 |
| | Administrasi Kegiatan PHRDP III Tahun 2013 | 2.360.550 | - | - | 2.360.550 |
| | Penyempurnaan Desain Kurikulum diklat Non-Gelar Tahun 2013 | 399.810 | - | - | 399.810 |
| | Rapat Koordinasi Diklat Gelar dan Non-Gelar Tahun 2013 | 563.950 | - | - | 563.950 |
| | Koordinasi dan Rintisan Program Tahun 2013 | 1.126.340 | - | - | 1.126.340 |
| | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan JFP Tahun 2013 | 1.036.270 | - | - | 1.036.270 |
| | Distance Learning Tahun 2013 | 871.150 | 3.360.000 | - | 4.231.150 |
| | Penyusunan Program dan Kegiatan Pusbindiklatren | 206.945 | - | - | 206.945 |

Konsultan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Konsultan | - | 9.500.000 | - | 9.500.000 |
| | Program Magang | 748.288 | 1.432.871 | - | 2.181.159 |
| | Program Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar Tahun 2013 | 17.300.404 | 17.106.891 | - | 34.407.295 |
| | Program Penyelenggaraan Pendidikan Gelar Tahun 2013 | 20.803.395 | 64.473.955 | - | 85.277.350 |
| | Pendaftaran dan Seleksi | 1.373.345 | - | - | 1.373.345 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Diklat Gelar dan Non-Gelar Tahun 2013 | 83.720 | - | - | 83.720 |
| | Penyusunan Soal Tes Materi Diklat Fungsional Perencana | 126.180 | - | - | 126.180 |
| | Penyusunan dan Pengembangan Modul Diklat Fungsional Perencana Tahun 2013 | 308.903 | - | - | 308.903 |
| | Workshop Penilaian Angka Kredit (PAK) Tahun 2013 | 353.900 | - | - | 353.900 |
| | Workshop Administrasi Penilaian Angka Kredit (APAK) Tahun 2013 | 221.900 | - | - | 221.900 |
| | Fasilitasi Bimbingan Teknik Jabatan Fungsional Perencana | 74.720 | - | - | 74.720 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Akreditasi Penyelenggaraan Diklat tahun 2013 | 234.170 | - | - | 234.170 |
| | Penilaian Angka Kredit Perencanaan Tahun 2013 | 154.242 | - | - | 154.242 |
| | Penyusunan Juknis/Juklak untuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana di Daerah tahun 2013 | 129.250 | - | - | 129.250 |
| | Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana | 434.124 | - | - | 434.124 |
| | Seleksi Calon Peserta Diklat Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2013 | 317.850 | - | - | 317.850 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana 2013 | 120.100 | - | - | 120.100 |
| | Diklat Staf PUSBIN DIKLATREN di Bidang Manajemen Pelatihan tahun 2013 | 390.000 | - | - | 390.000 |
| | Penerbitan Majalah Simpul Perencana Kegiatan Tahun 2013 | 233.900 | - | - | 233.900 |
| | Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja PUSBINDKLATREN Tahun 2013 | 357.615 | - | - | 357.615 |
| | Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana dan Diklat tahun 2013 | 625.895 | - | - | 625.895 |
| | Penyempurnaan Buku Panduan dan Pedoman Diklat tahun 2013 | 335.500 | - | - | 335.500 |

Pengelolaan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Pengelolaan Wabsite Tahun 2013 | 177.175 | ~ | ~ | 177.175 |
| | Kesekretariatan PUSBINDIKLATREN Tahun 2013 | 100.600 | ~ | ~ | 100.600 |
| | Workshop Implementasi Tata Naskah Dinas dan Sistem Kearsipan Tahun 2013 | 105.150 | ~ | ~ | 105.150 |
| | Kegiatan Biro SDM | 4.270.000 | ~ | ~ | 4.270.000 |
| | SPIRIT / WORLD BANK | 3.225.888 | 90.056.479 | ~ | 93.282.367 |
| | Administrasi Proyek | 2.514.120 | 621.545 | ~ | 3.135.665 |
| | Pemantauan dan Evaluasi Diklat | 75.000 | 943.420 | ~ | 1.018.420 |
| | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program | 479.093 | ~ | ~ | 479.093 |
| | Konsultan | ~ | 5.150.875 | ~ | 5.150.875 |
| | Diklat Gelar | ~ | 67.300.292 | ~ | 67.300.292 |
| | Briefing Peserta Diklat Dalam Negeri | 108.775 | ~ | ~ | 108.775 |

Diklat ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Diklat Non-Gelar | - | 9.971.889 | - | 9.971.889 |
| | <i>Pre Departure</i> | - | 5.494.058 | - | 5.494.058 |
| | Pendaftaran dan Seleksi Calon Peserta Diklat Gelar | 48.900 | 574.400 | - | 623.300 |
| 2918 | Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 |
| | Kajian Kapasitas dan Kebutuhan di Bidang Perubahan Iklim | 700.000 | - | - | 700.000 |
| | Kajian Evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan | 700.000 | - | - | 700.000 |
| | Kegiatan Penguatan Hubungan Kelembagaan Antara Bappenas dan <i>Stakeholders</i> Pembangunan | 700.000 | - | - | 700.000 |
| | Kajian Analisa Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan | 700.000 | - | - | 700.000 |
| | Kajian Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Kelautan | 700.000 | - | - | 700.000 |
| | | - | - | - | - |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 055.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS | 57.750.000 | ~ | ~ | 57.750.000 |
| 2919 | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional | 57.750.000 | ~ | ~ | 57.750.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional | 54.083.137 | ~ | ~ | 54.083.137 |
| | Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional | 3.666.863 | ~ | ~ | 3.666.863 |
| 055.01.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BAPPENAS | 4.800.000 | ~ | ~ | 4.800.000 |
| 2920 | Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum | 3.029.000 | ~ | ~ | 3.029.000 |
| | Kegiatan Inspektorat Utama | 575.000 | ~ | ~ | 575.000 |
| | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 200.000 | ~ | ~ | 200.000 |
| | Kegiatan Optimalisasi Peran Konsultasi internal Auditor | 324.000 | ~ | ~ | 324.000 |
| | Peningkatan Kompetensi Profesi Auditor secara berkelanjutan | 270.000 | ~ | ~ | 270.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Monitoring Pengawasan Anggaran | 200.000 | - | - | 200.000 |
| | Koordinasi Strategis Rencana Aksi mempertahankan Opini Laporan Keuangan | 350.000 | - | - | 350.000 |
| | Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 260.000 | - | - | 260.000 |
| | Kegiatan Pemeriksaan/Audit | 100.000 | - | - | 100.000 |
| | Kegiatan Penyusunan UPKAPT, Reviu RAB dan Laporan Keuangan kementerian PPN/Bappenas | 390.000 | - | - | 390.000 |
| | Kegiatan Penguatan Integritas di Kementerian PPN/Bappenas | 100.000 | - | - | 100.000 |
| | Penyusunan Kebijakan <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> | 260.000 | - | - | 260.000 |
| 2921 | Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan | 1.771.000 | - | - | 1.771.000 |
| | Kegiatan Optimalisasi Peran Koordinasi Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan | 350.000 | - | - | 350.000 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Penilaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 275.000 | - | - | 275.000 |

Kegiatan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Kegiatan Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi | 325.000 | - | - | 325.000 |
| | Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan | 196.000 | - | - | 196.000 |
| | Pemetaan Proses Bisnis persiapan penyusunan RPJMN 2014-2019 | 275.000 | - | - | 275.000 |
| | Pengawasan Kinerja Program/Kegiatan | 350.000 | - | - | 350.000 |
| 055.01.06 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 165.647.497 | 70.160.600 | 217.805.804 | 453.613.901 |
| | KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | 15.765.198 | - | 7.771.804 | 23.537.002 |
| 2922 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama dan Pendidikan | 2.328.800 | - | - | 2.328.800 |
| | Kajian <i>Background Study</i> Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan | 750.000 | - | - | 750.000 |
| | Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 Bidang Pendidikan | 400.000 | - | - | 400.000 |

Koordinasi ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Koordinasi Strategis Perencanaan Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Bidang Pendidikan Tahun 2013 | 350.000 | ~ | ~ | 350.000 |
| | Pemantauan Terpadu Pelaksanaan Rencana Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2013 | 335.757 | ~ | ~ | 335.757 |
| | Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tahun 2013 | 343.043 | ~ | ~ | 343.043 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 | 150.000 | ~ | ~ | 150.000 |
| 2933 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga | 5.628.800 | ~ | ~ | 5.628.800 |
| | Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Bidang Agama, Kebudayaan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga | 479.072 | ~ | ~ | 479.072 |
| | Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan PPK Bidang SDM dan Kebudayaan Tahun 2013 | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | <i>Background study</i> Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga | 757.356 | ~ | ~ | 757.356 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Evaluasi Terpadu Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Pemuda & Olahraga | 492.372 | - | - | 492.372 |
| | Pemantauan Terpadu Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Pemuda & Olahraga | 500.000 | - | - | 500.000 |
| | Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan RAD Percepatan Pencapaian MDGs | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 |
| | Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang SDM dan Kebudayaan | 600.000 | - | - | 600.000 |
| 2936 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 3.228.799 | - | 1.500.000 | 4.728.799 |
| | Evaluasi Program Perlindungan Anak | 472.809 | - | - | 472.809 |
| | Background Study Penyusunan RPJMN Ke-3 Tahun 2015-2019 Bidang Kependudukan, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 879.850 | - | - | 879.850 |
| | Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus Ke 8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2013 | 737.205 | - | - | 737.205 |

Pemantauan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Pemantauan Pelaksanaan RKP 2013 Bidang Kependudukan, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 394.540 | - | - | 394.540 |
| | Koordinasi Terpadu Perencanaan & Penganggaran Kebijakan & Program serta Penguatan Data Pembangunan Bid. Kependudukan, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 594.395 | - | - | 594.395 |
| | UNFPA Country Programme Eight 2011-2015 <i>Program Cooperative Between The GOI-UNFPA</i> | - | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Koordinasi Strategis Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang KB | 150.000 | - | - | 150.000 |
| 2937 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 4.578.799 | - | 6.271.804 | 10.850.603 |
| | Background Study Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 794.140 | - | - | 794.140 |
| | Evaluasi Terpadu Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2012 | 492.946 | - | - | 492.946 |
| | Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 500.000 | - | - | 500.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Koordinasi Pengelolaan dan Pemantauan Proyek PHILN Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 392.606 | - | - | 392.606 |
| | Pemantauan Terpadu Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 500.000 | - | - | 500.000 |
| | Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-Unicef 2011-2015 Tahun 2013 | 375.279 | - | - | 375.279 |
| | Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance For Rice Fortification For The Poor (FFPR - ADB) Tahun Anggaran 2013 | 400.000 | - | - | 400.000 |
| | Koordinasi Startegis Pengelolaan Program Kerjasama RI - Unicef 2011-2015 Tahun 2013 | - | - | 3.575.000 | 3.575.000 |
| | Koordinasi Pengelolaan Hibah Assistance For Rice Fortification For the Poor (Hibah JFPR : Assistance for Rice Fortification for the Poor) TA 2013 | - | - | 2.696.804 | 2.696.804 |
| | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Daerah Pangan dan Gizi (RAN-PG dan RAD-PG) 2011-2015 | 973.828 | - | - | 973.828 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) | 150.000 | - | - | 150.000 |

KEDEPUTIAN ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| - | KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN | 12.193.342 | ~ | ~ | 12.193.342 |
| 2924 | Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi | 2.138.993 | ~ | ~ | 2.138.993 |
| | Koordinasi Strategis Analisis Peraturan Perundang-undangan | 425.886 | ~ | ~ | 425.886 |
| | Pemetaan Kebutuhan Regulasi Tahun 2014 Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Pelaksanaan Pembentukan Kerangka Regulasi di dalam Program Legislasi Pemerintah Tahunan | 250.000 | ~ | ~ | 250.000 |
| | Evaluasi Sinergitas Kerangka Regulasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Program Legislasi Tahun 2012 | 250.000 | ~ | ~ | 250.000 |
| 2925 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara | 3.912.505 | ~ | ~ | 3.912.505 |
| | Peningkatan Sinergi Substansi Rencana Pembangunan Nasional Bidang Aparatur Negara | 350.000 | ~ | ~ | 350.000 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional Bidang Aparatur Negara | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |

Evaluasi ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2929 | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Bidang Aparatur Negara Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Direktorat Aparatur Negara Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik (<i>Good Public Governance</i>) Background Study Bidang Aparatur Negara untuk Penyusunan RPJMN 2015-2019 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum Evaluasi Peran Kemenkumham Sebagai Otoritas Pusat (<i>Central Authority</i>) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2013 <i>Background Study</i> RPJMN 2015-2019 Bidang Hukum dan HAM Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah di Daerah Perbatasan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | 350.000 750.000 844.782 1.217.723 2.506.987 309.826 216.452 1.085.569 372.452 322.688 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 350.000 750.000 844.782 1.217.723 2.506.987 309.826 216.452 1.085.569 372.452 322.688 |

Sekretariat ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH 6 = (3+4+5) |
|------|---|--|----------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Sekretariat PPK Deputy Bidang Polhukhankam | 200.000 | ~ | ~ | 200.000 |
| 2956 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan Kegiatan Keterpaduan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Pertahanan 2013-2014, RPJMN dan RKP Kegiatan Perencanaan Penilaian Pembangunan Pertahanan 2010 - 2013, Ketercapaian RPJMN dan RKP Kegiatan <i>Outcome Mapping</i> Pencapaian Pembangunan Pertahanan 2010-2013, RPJMN dan RKP | 894.774 300.000 350.000 244.774 | ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ | 894.774 300.000 350.000 244.774 |
| 2957 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi Kordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Ri - Amerika Serikat di Bidang Demokrasi dan Tatakelola Pemerintahan (<i>Democracy And Governance Programs</i>) Fasilitasi Penyiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia | 2.740.083 423.000 331.877 395.000 | ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ | 2.740.083 423.000 331.877 395.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Evaluasi RPJMN II (2010 - 2014) Bidang Politik dan Komunikasi Tahun Ketiga (2012) | 297.200 | ~ | ~ | 297.200 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi | 297.200 | ~ | ~ | 297.200 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Program <i>Peace Corps</i> di Indonesia | 256.600 | ~ | ~ | 256.600 |
| | Backgroud Study Bidang Politik dan Komunikasi untuk Penyusunan RPJMN II (2015-2019) | 739.206 | ~ | ~ | 739.206 |
| - | KEDEPUTIAN BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM | 16.805.330 | ~ | 3.000.000 | 19.805.330 |
| 2942 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 2.699.050 | ~ | ~ | 2.699.050 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sistem Pendukung dan Pembiayaan Usaha Tahun 2012 | 500.000 | ~ | ~ | 500.000 |
| | <i>Backgroud study</i> Penyiapan RPJMN 2015-2019 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM | 999.050 | ~ | ~ | 999.050 |
| | Koordinasi Perencanaan Peningkatan Peran Koperasi dan Iklim Usaha Tahun 2013 | 450.000 | ~ | ~ | 450.000 |
| | Pemantauan Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Tahun 2013 | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |

Kajian ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Kajian Analisis Komponen Strategis Daya Saing UMKM | 350.000 | ~ | ~ | 350.000 |
| 2943 | Perencanaan Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Sosialisasi Pelaksanaan MP3KI Pemantauan Implementasi Instrumen P3BM Evaluasi Pelaksanaan RAN Program Penanggulangan Kemiskinan <i>Background Study</i> Program-Program Penanggulangan Kemiskinan 2015-2019 MIS PNPM Mandiri Tahap II | 3.333.650 500.000 863.950 500.000 500.000 500.000 969.700 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 3.000.000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 6.333.650 500.000 863.950 500.000 500.000 969.700 3.000.000 |
| 2954 | Perencanaan Pembangunan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kajian Pemperdayaan Sosial Komunikasi Adat Terpencil (KAT) | 6.585.130 544.238 | ~ ~ | ~ ~ | 6.585.130 544.238 |

Evaluasi ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Evaluasi Program Bagi Anak yang Menyandang Masalah Sosial | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Pemantauan Pelaksanaan Program-Program Bantuan Sosial | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Koordinasi Perencanaan Program-Program Jaminan Sosial | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) | 419.892 | ~ | ~ | 419.892 |
| | Background Study Persiapan RPJMN 2015-2019 Bidang Perlindungan Sosial | 800.000 | ~ | ~ | 800.000 |
| | <i>Global Pulse</i> | 3.921.000 | ~ | ~ | 3.921.000 |
| 2961 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja | 4.187.500 | ~ | ~ | 4.187.500 |
| | Penetapan Isu Strategis Ketenagakerjaan RPJMN 2015-2019 | 320.182 | ~ | ~ | 320.182 |
| | Pemantauan Program-Program Penanganan Pengangguran Kaum Muda | 513.234 | ~ | ~ | 513.234 |
| | <i>Background Study</i> Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019 Bidang Ketenagakerjaan | 1.592.354 | ~ | ~ | 1.592.354 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Evaluasi Kebijakan dan Program Penciptaan Kesempatan Kerja | 537.030 | ~ | ~ | 537.030 |
| | Penetapan Peraturan Ketenagakerjaan dalam Rangka Penyempurnaan Kebijakan | 245.700 | ~ | ~ | 245.700 |
| | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM | 679.000 | ~ | ~ | 679.000 |
| | Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| - | KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI | 11.986.360 | ~ | ~ | 11.986.360 |
| 2930 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Iptek, dan BUMN | 1.953.272 | ~ | ~ | 1.953.272 |
| | Evaluasi Kinerja Program Terkait Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Direktorat IIB | 328.272 | ~ | ~ | 328.272 |
| | Pemantauan Kinerja Program Ketahanan Pangan pada Sektor Industri Direktorat IIB | 375.000 | ~ | ~ | 375.000 |
| | Koordinasi Pembangunan Bidang IIB | 500.000 | ~ | ~ | 500.000 |
| | Kajian Penyusunan Rancangan Naskah Akademis RPIMN 2015-2019 Arah Kebijakan IIB | 470.000 | ~ | ~ | 470.000 |

Koordinasi ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2931 | Koordinasi Pembangunan Deputy Bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Pemantauan Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 JKAM Kajian Pengembangan Sektor Keuangan dalam Kaitannya dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang JKAM Evaluasi Pelaksanaan RPJMN dan RKP Tahun 2012 Bidang JKAM Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Koordinasi dan pemantauan kerjasama RI-US Aid di Bidang Pertumbuhan Ekonomi | 280.000 2.203.784 334.626 410.030 464.656 279.059 229.041 486.372 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 280.000 2.203.784 334.626 410.030 464.656 279.059 229.041 486.372 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--|----------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2938 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara Kajian Efektifitas Utang Pemerintah Terhadap Perekonomian Tinjauan Terhadap Standar Prosedur Operasi (SOP) Layanan Unggulan Bidang Kekayaan Negara guna Mendukung Pencapaian Program pembangunan Sinkronisasi dan Integrasi Antara Sektor dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Keuangan Negara Reviu Efektifitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) | 1.773.270 500.000 385.000 | ~ ~ ~ | ~ ~ ~ | 1.773.270 500.000 385.000 |
| 2950 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prioritas Nasional 7 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Prioritas Nasional 7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prioritas Nasional 7 | 1.953.034 442.870 385.192 286.256 | ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ | 1.953.034 442.870 385.192 286.256 |

Koordinasi ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, & Evaluasi Dana Alokasi Khusus Perdagangan <i>Background study</i> RPJMN 2015-2019 Bidang PIKEI | 247.230 | ~ | ~ | 247.230 |
| 2952 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro | 4.103.000 | ~ | ~ | 4.103.000 |
| | Koordinasi Perencanaan Fiskal dan Moneter | 500.000 | ~ | ~ | 500.000 |
| | Pemantauan Perkembangan Stabilitas Fiskal dan Moneter | 430.000 | ~ | ~ | 430.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Fiskal dan Moneter | 425.000 | ~ | ~ | 425.000 |
| | Kajian Penyusunan Sasaran Indikator Kerangka Ekonomi Makro dalam Rancangan RPJMN 2015-2019 | 495.000 | ~ | ~ | 495.000 |
| | Kajian Pengembangan Model Ekonomi Makro Bappenas | 2.253.000 | ~ | ~ | 2.253.000 |

KEDEPUTIAN ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| - | KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | 16.026.172 | ~ | 4.000.000 | 20.026.172 |
| 2934 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air | 2.600.803 | ~ | ~ | 2.600.803 |
| | Koordinasi Program dan Kebijakan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Evaluasi Kebijakan dan Program Pembangunan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air | 327.993 | ~ | ~ | 327.993 |
| | Kajian Analisis <i>Supply Demand</i> Kayu untuk Industri Kehutanan Berbasis Kayu | 535.279 | ~ | ~ | 535.279 |
| | Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air | 350.000 | ~ | ~ | 350.000 |
| | Koordinasi Penyusunan Perencanaan Perencanaan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan | 187.531 | ~ | ~ | 187.531 |
| | <i>Background Study</i> Strategi dan Arah Pembangunan Kehutanan 2015-2019 | 500.000 | ~ | ~ | 500.000 |
| | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2935 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan Koordinasi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Evaluasi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kajian Sistem Logistik Perikanan dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Perekonomian Nasional Pemantauan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan <i>Background Study</i> RPJMN Tahun 2015-2019 Bidang Kelautan dan Perikanan Koordinasi Strategis Penyusunan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan | 3.075.369 450.000 384.528 581.107 383.562 576.172 500.000 200.000 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 3.075.369 450.000 384.528 581.107 383.562 576.172 500.000 200.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | | | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--|---|---|--|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) | | |
| 2939 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup Koordinasi Identifikasi Isu-Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2013 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah di Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (Pendukung) Evaluasi Implementasi Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2012 Kajian Pengarusutamaan <i>Indonesia Biodiversity and Action Plan</i> (IBSAP) ke dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia Pemantauan Kinerja Pemerintah dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Koordinasi Strategis Penyiapan dan Penguatan untuk <i>Indonesia Climate Change Trust Fund</i> (ICCTF) Koordinasi Strategis Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAN- GRK, RAD-GRK, dan RAN-API <i>Background Study</i> untuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup | 4.300.000 420.000 450.000 350.000 600.000 280.000 600.000 200.000 900.000 500.000 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 4.000.000 - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 8.300.000 420.000 450.000 350.000 600.000 280.000 600.000 200.000 900.000 500.000 | | |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|--------------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| PREP - ICCTF | | - | - | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2941 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian | 2.850.000 | - | - | 2.850.000 |
| | Koordinasi Perencanaan Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014 dan Isu-Isu Strategis Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian Tahun 2013 | 450.000 | - | - | 450.000 |
| | Evaluasi Efektivitas Program - Program Utama P2BN (SLPTT, Optimalisasi Lahan, Irigasi dan GP3K) terhadap Peningkatan Produksi Padi | 400.000 | - | - | 400.000 |
| | Kajian Strategi Revitalisasi Pekebunan Tebu dan Industri Gula dalam Rangka Menuju Swasembada Gula Berkelanjutan | 490.000 | - | - | 490.000 |
| | Pemantauan Pengelolaan Stok Beras Nasional Mendukung Stabilitas Harga dan Penyediaan Pangan Nasional | 320.000 | - | - | 320.000 |
| | Koordinasi Strategis Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pangan dan Pertanian | 200.000 | - | - | 200.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Iklim Ekstrem untuk Mengamankan Produksi Beras Nasional | 490.000 | - | - | 490.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2959 | <p><i>Background study</i> untuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian</p> <p>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan</p> <p>Koordinasi Program dan Kebijakan Sektor Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Sumber Daya Energi</p> <p>Kajian Pengembangan Model dalam Mendukung Perencanaan Energi</p> <p>Koordinasi Strategis Pengembangan Gas Bumi Dalam Negeri</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Mineral dan Pertambangan</p> <p>Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Energi, Mineral dan Pertambangan Tahun 2013</p> <p>Koordinasi Strategis Pengembangan dan Percepatan Investasi Panas Bumi</p> <p><i>Background study</i> Strategi dan Arah Kebijakan Sektor Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Jangka Menengah 2015-2019</p> | <p>500.000</p> <p>3.200.000</p> <p>350.000</p> <p>250.000</p> <p>650.000</p> <p>400.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> | <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> | <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> | <p>500.000</p> <p>3.200.000</p> <p>350.000</p> <p>250.000</p> <p>650.000</p> <p>400.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| - | <u>KEDEPUPTAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA</u> | 27.604.641 | 62.855.600 | 3.800.000 | 94.260.241 |
| 2926 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika | 1.826.983 | ~ | ~ | 1.826.983 |
| | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Komunikasi dan Informatika | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Komunikasi dan Informatika | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Komunikasi dan Informatika | 276.983 | ~ | ~ | 276.983 |
| | Kajian <i>Backgroud Study</i> RPJMN 2015-2019 Sektor Energi dan Ketenagalistrikan | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Kajian <i>Backgroud Study</i> RPJMN 2015-2019 Sektor Komunikasi dan Informatika | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan DAK Bidang Energi Baru Terbarukan untuk Pemenuhan Energi dan Listrik Perdesaan (USDES EBT) | 150.000 | ~ | ~ | 150.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2947 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA Koordinasi Strategis Sekretariat Tim Pengarah Nasional Bidang Prasarana SDA Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang SDA Kajian Pengelolaan Bidang SDA Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang SDA Sekretariat PPK PSDAT <i>Water Irrigation Sector Management Program APL 2</i> <i>Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project – JICA</i> <i>Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia II – JICA</i> <i>Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program – ADB</i> | 4.520.588 304.500 870.963 250.000 400.000 250.000 250.000 250.000 | 14.683.000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 19.203.588 304.500 870.963 250.000 400.000 250.000 250.000 985.500 |
| | | 770.000 | 6.300.000 | ~ | 7.070.000 |

Urban ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | <i>Urban Flood Control in Selected Cities – JICA</i> | - | 1.900.000 | ~ | 1.900.000 |
| | <i>Dam Operational Improvement and Safety Project – WB</i> | 180.000 | 720.000 | ~ | 900.000 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK | 110.000 | ~ | ~ | 110.000 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan, Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan | 887.625 | ~ | ~ | 887.625 |
| 2948 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta | 14.310.570 | 48.172.600 | ~ | 62.483.170 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur | 250.000 | ~ | ~ | 250.000 |
| | Kajian Penyiapan Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pembentukan Badan Usaha Terkait Kerjasama Pemerintah dan Swasta | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Kajian Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur | 250.000 | ~ | ~ | 250.000 |

Sekretariat ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Sekretariat Pelaksana Harian Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPP) | 500.000 | - | - | 500.000 |
| | Pelaksanaan Penyusunan dan Perbaruan Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (RPKPS)/PPP Book 2012 | 1.850.000 | - | - | 1.850.000 |
| | Sekretariat Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas - BKPM | 1.450.000 | - | - | 1.450.000 |
| | Sekretariat Pendukung Hibah JICA <i>The Project For PPP Network Enhancement</i> | 470.000 | - | - | 470.000 |
| | <i>Infrastructure Reform Sector Development Project (RM)</i> | 8.340.570 | - | - | 8.340.570 |
| | <i>Infrastructure Reform Sector Development Project (PLN)</i> | - | 48.172.600 | - | 48.172.600 |
| 2955 | Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan | 2.998.479 | - | 3.800.000 | 6.798.479 |
| | Koordinasi Percepatan Pencapaian Target <i>Millennium Development Goals</i> (MDGs) di Bidang Perumahan dan Perumahan | 300.000 | - | - | 300.000 |
| | Penantauan Penanggungulangan Kemiskinan Kluster Empat Bidang Perumahan dan Perumahan Tahun 2013 | 288.640 | - | - | 288.640 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Evaluasi Pencapaian Target <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs) Bidang Permukiman dan Perumahan Tahun Anggaran 2013 | 282.886 | ~ | ~ | 282.886 |
| | <i>Background Study</i> Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | 481.106 | ~ | ~ | 481.106 |
| | Koordinasi Strategis Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK TA 2012 Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Bidang Perumahan dan Permukiman | 200.000 | ~ | ~ | 200.000 |
| | Sekretariat <i>Water And Sanitation Policy And Action Planning Facility</i> | 75.000 | ~ | ~ | 75.000 |
| | Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional | 500.000 | ~ | ~ | 500.000 |
| | Sekretariat <i>Slum Alleviation Policy And Action Plan/Sapola</i> (Hibah Bank Dunia) | 480.456 | ~ | ~ | 480.456 |
| | <i>Slum Alleviation Policy And Action Plan/SAPOLA</i> | ~ | ~ | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan | 390.391 | ~ | ~ | 390.391 |
| | Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi- PHLN | ~ | ~ | 2.600.000 | 2.600.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | | | | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) | | | |
| 2962 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi Penyusunan Rencana Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2014 Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2013 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2012 Kordinasi Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Transportasi Jalan Kordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Transportasi TA 2013 Kajian Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 Sektor Transportasi Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Tahun 2014 Pembinaan Administrasi Keuangan PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Tahun 2013 | 3.948.021 350.000 400.000 250.000 694.570 300.000 1.253.451 400.000 300.000 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 3.948.021 350.000 400.000 250.000 694.570 300.000 1.253.451 400.000 300.000 | | | |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| - | KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH | 23.025.922 | 7.305.000 | ~ | 30.330.922 |
| 2932 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal | 3.931.175 | ~ | ~ | 3.931.175 |
| | Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Rawan Bencana dan Daerah Tertinggal | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Kajian Strategis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Papua dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Terbatas | 313.715 | ~ | ~ | 313.715 |
| | Koordinasi Pemantauan Program Kawasan Strategis Nasional Kementerian PPN/Bappenas | 200.000 | ~ | ~ | 200.000 |
| | Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan (Strategis, Rawan Bencana, Perbatasan dan Daerah Tertinggal) | 250.000 | ~ | ~ | 250.000 |
| | Koordinasi Strategis Asistensi Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK) | 530.000 | ~ | ~ | 530.000 |
| | Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) | 445.460 | ~ | ~ | 445.460 |

Tim ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2940 | <p>Tim Koordinasi <i>The Indonesia Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery</i> (IMDFDR)</p> <p>Tim Koordinasi Keberlanjutan Rekonstruksi di Propinsi Aceh dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (KKR-Aceh-Nias)</p> <p>Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Sarpras Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan</p> <p>Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perencanaan Program (KAPET) dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</p> <p>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah</p> <p>Koordinasi Penyusunan RKP 2014</p> <p>Pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan RKP 2013</p> <p>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2012</p> <p>Kajian Backgroud Study RPJMN 2015-2019 Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah</p> | <p>519.000</p> <p>475.000</p> <p>110.000</p> <p>388.000</p> <p>4.492.816</p> <p>260.580</p> <p>236.556</p> <p>251.135</p> <p>386.105</p> | <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> | <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p> | <p>519.000</p> <p>475.000</p> <p>110.000</p> <p>388.000</p> <p>4.492.816</p> <p>260.580</p> <p>236.556</p> <p>251.135</p> <p>386.105</p> |

Koordinasi ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang Prasarana Pemerintah | 137.644 | ~ | ~ | 137.644 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) | 2.229.988 | ~ | ~ | 2.229.988 |
| | Koord. Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah | 502.082 | ~ | ~ | 502.082 |
| | Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program PGSP | 488.726 | ~ | ~ | 488.726 |
| 2949 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah | 7.522.107 | 7.305.000 | ~ | 14.827.107 |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial dalam Mendukung Pengembangan Regional dan Otda | 1.075.000 | ~ | ~ | 1.075.000 |
| | Koordinasi Percepatan Pembangunan Propinsi NTT | 331.712 | ~ | ~ | 331.712 |
| | Kajian Pengembangan Model Pembangunan Propinsi | 415.000 | ~ | ~ | 415.000 |
| | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Wilayah | 218.995 | ~ | ~ | 218.995 |

Pemantauan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH 6 = (3+4+5) |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Wilayah | 200.000 | - | - | 200.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah | 200.000 | - | - | 200.000 |
| | Pengembangan Sistem Usulan Pendanaan Pembangunan Daerah | 400.000 | - | - | 400.000 |
| | Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PNPM-PISEW | 956.500 | - | - | 956.500 |
| | Koordinasi Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah | 500.000 | - | - | 500.000 |
| | Kesekretariatan PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah | 300.000 | - | - | 300.000 |
| | Penyusunan <i>Backgroud Studi</i> Penyusunan RPJMN 2015-2019 | 2.430.000 | - | - | 2.430.000 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan RPJMN 2015-2019 Buku III Bidang Pengembangan Wilayah | 494.900 | - | - | 494.900 |
| | Tim Pendukung Koordinasi Pusat (KPTKP) | - | 7.305.000 | - | 7.305.000 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2953 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Perkotaan & Perdesaan serta Pengembangan Ekonomi Lokal & Daerah Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2013 Bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan, serta Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Kajian Naskah Akademik RPJMN 2015-2019 Bidang Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Evaluasi Pembangunan Perkotaan di Indonesia Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELLD) Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (PKN) | 3.130.409 300.008 250.000 400.000 200.000 1.065.236 | ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ | 3.130.409 300.008 250.000 400.000 200.000 1.065.236 |
| 2960 | Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan Kajian Kelembagaan Penataan Ruang untuk Pengendalian Penataan Ruang Tingkat Nasional dan Arah Kebijakan Pertanahan Nasional | 3.949.415 395.050 | ~ ~ | ~ ~ | 3.949.415 395.050 |

Koordinasi ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH 6 = (3+4+5) |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan | 225.000 | ~ | ~ | 225.000 |
| | Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan | 304.340 | ~ | ~ | 304.340 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan | 245.090 | ~ | ~ | 245.090 |
| | Koordinasi Strategis Reformasi Agraria Nasional (RAN) | 800.000 | ~ | ~ | 800.000 |
| | Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) | 1.979.935 | ~ | ~ | 1.979.935 |
| 2923 | KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN | 29.900.547 | ~ | 199.234.000 | 229.134.547 |
| | Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan | 3.752.928 | ~ | 750.000 | 4.502.928 |
| | Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2013 | 536.316 | ~ | ~ | 536.316 |
| | Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2013 | 2.034.543 | ~ | ~ | 2.034.543 |
| | Evaluasi Alokasi Pendanaan Pembangunan Tahun 2013 | 199.280 | ~ | ~ | 199.280 |

Kajian ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Kajian Alokasi Pendanaan Pembangunan: Alokasi Pendanaan dalam RPJMN 2015-2019 | 294.042 | ~ | ~ | 294.042 |
| | Pemantauan Alokasi Pendanaan Pembangunan Tahun 2013 | 244.220 | ~ | ~ | 244.220 |
| | PFM-MDTF <i>Planning and Budgeting Reform</i> | ~ | ~ | 750.000 | 750.000 |
| | Pengembangan dan Pemutakhiran <i>Database</i> Pendanaan Pembangunan Tahun 2013 | 310.932 | ~ | ~ | 310.932 |
| | Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Tahun 2013: Persiapan DAK d/r Pengalihan Belanja K/L | 133.595 | ~ | ~ | 133.595 |
| 2944 | Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral | 16.845.424 | ~ | 196.000.000 | 212.845.424 |
| | Peningkatan Kesiapan Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral | 492.828 | ~ | ~ | 492.828 |
| | Pengembangan Kerjasama Bilateral Melalui Dukungan Kebijakan dan Pembiayaan Pembangunan | 363.388 | ~ | ~ | 363.388 |
| | Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Proyek-proyek yang didanai PHLN Bilateral | 367.742 | ~ | ~ | 367.742 |
| | Evaluasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Bilateral | 294.768 | ~ | ~ | 294.768 |

Kajian ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Kajian Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Bilateral | 487.580 | ~ | ~ | 487.580 |
| 2945 | Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan <i>Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact</i> Sekretariat PPK Kegiatan Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC | 14.292.348 | ~ | 196.000.000 | 210.292.348 |
| | Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral | 4.474.020 | ~ | 2.484.000 | 6.958.020 |
| | <i>Policy Paper</i> : <i>Review</i> Strategi Kerjasama Pembangunan Pemerintah Indonesia dan Lembaga Pendanaan Bank Dunia | 99.374 | ~ | ~ | 99.374 |
| | <i>Policy Paper</i> : <i>Review</i> Strategi Kerjasama Pembangunan Pemerintah Indonesia dan Lembaga Pendanaan ADB | 99.374 | ~ | ~ | 99.374 |
| | <i>Policy Paper</i> : <i>Review</i> Strategi Kerjasama Pembangunan Pemerintah Indonesia dan Lembaga Pendanaan IDB | 310.005 | ~ | ~ | 310.005 |
| | Pemantauan Perencanaan Pendanaan Multilateral | 436.103 | ~ | ~ | 436.103 |
| | Koordinasi Penyiapan Program/Proyek Multilateral | 229.792 | ~ | ~ | 229.792 |
| | Pendukung Koordinasi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan <i>International Fund For Agriculture Development</i> | 229.792 | ~ | ~ | 229.792 |

Hibah ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH 6 = (3+4+5) |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Hibah UNDP - <i>Strengthening Innovative Partnership in Development Cooperation</i> (SIP-DC) | - | ~ | 2.484.000 | 2.484.000 |
| | Pendukung Hibah UNDP - <i>Strengthening Innovative Partnership in Development Cooperation</i> (SIP-DC) | 200.000 | ~ | ~ | 200.000 |
| | Training di Bidang <i>Disaster Risk Management</i> dalam Rangka Penunjang Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan | 1.089.700 | ~ | ~ | 1.089.700 |
| | Training di Bidang Demokrasi dalam Rangka Penunjang Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan | 829.100 | ~ | ~ | 829.100 |
| | Training di Bidang Inseminasi Buatan dalam Rangka Penunjang Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan | 1.081.198 | ~ | ~ | 1.081.198 |
| | Perencanaan Pembangunan Bidang Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan | 2.401.795 | ~ | ~ | 2.401.795 |
| 2946 | Koordinasi Pendayagunaan Pinjaman Luar Negeri | 694.286 | ~ | ~ | 694.286 |
| | Koordinasi Penyusunan Rencana Penarikan PHLN untuk Penyusunan Pagu Indikatif 2014 | 210.000 | ~ | ~ | 210.000 |
| | Koordinasi Monitoring Hibah | 318.460 | ~ | ~ | 318.460 |

Pemantauan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH 6 = (3+4+5) |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Pemantauan Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan | 393.216 | ~ | ~ | 393.216 |
| | Evaluasi Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan | 260.610 | ~ | ~ | 260.610 |
| | Kajian <i>Review</i> DIPA <i>Tracking</i> untuk Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri | 425.223 | ~ | ~ | 425.223 |
| | <i>Policy Paper</i> Pelaksanaan "Kontrak Kinerja" untuk Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | 100.000 | ~ | ~ | 100.000 |
| 2951 | Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan | 2.426.380 | ~ | ~ | 2.426.380 |
| | Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan | 552.205 | ~ | ~ | 552.205 |
| | Pemantauan Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pembangunan | 269.960 | ~ | ~ | 269.960 |
| | Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan | 312.700 | ~ | ~ | 312.700 |
| | Kajian Perencanaan Pendanaan Pembangunan Nasional | 410.184 | ~ | ~ | 410.184 |
| | Koordinasi Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan | 577.189 | ~ | ~ | 577.189 |

Kegiatan ...

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Kegiatan Sekretariat PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan | 304.142 | ~ | ~ | 304.142 |
| - | KEDEPUTIAN BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | 12.339.985 | ~ | ~ | 12.339.985 |
| 2927 | Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 8.215.630 | ~ | ~ | 8.215.630 |
| | Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2013 di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi | 6.688.218 | ~ | ~ | 6.688.218 |
| | Kajian Penyusunan <i>Database</i> dan Evaluasi APBD | 418.197 | ~ | ~ | 418.197 |
| | Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua | 345.511 | ~ | ~ | 345.511 |
| | Monitoring RKP 2013 di Daerah | 234.206 | ~ | ~ | 234.206 |
| | Kegiatan Kedepuitan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan | 529.498 | ~ | ~ | 529.498 |
| | 2928 Evaluasi ... | | | | |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| 2928 | Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral | 2.415.070 | ~ | ~ | 2.415.070 |
| | Koordinasi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Evaluasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri | 300.000 | ~ | ~ | 300.000 |
| | Evaluasi Program PNPMM Mandiri | 350.000 | ~ | ~ | 350.000 |
| | Evaluasi Pembangunan Transportasi di Indonesia | 400.000 | ~ | ~ | 400.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional | 765.070 | ~ | ~ | 765.070 |
| 2958 | Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan | 1.709.285 | ~ | ~ | 1.709.285 |
| | Koordinasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional Terpadu | 400.150 | ~ | ~ | 400.150 |
| | Kajian Pedoman Penyusunan RPJMN | 627.212 | ~ | ~ | 627.212 |

| KODE | KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN | RUPIAH MURNI | PINJAMAN LUAR NEGERI | HIBAH LUAR NEGERI | JUMLAH |
|------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| | Evaluasi Penggunaan Indikator Kinerja di Kementerian/Lembaga untuk Penataan Perumusan Indikator Kinerja yang Tepat | 344.900 | - | - | 344.900 |
| | Pemantauan Pelaksanaan E-Monev Kinerja Pembangunan Nasional | 337.023 | - | - | 337.023 |

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun